



Pengembangan Objek Wisata Pantai Batu Bengkung Kabupaten Malang Dalam Perspektif Collaborative Governance

Tariza Noviranti Muhaling

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Hasan Ismail

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi Penulis : tariza513@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to analyze collaborative governance in the development of Batu Bengkung beach tourism objects in Malang Regency. Malang Regency has a wide variety of potential tourist objects, one of the leading tourist objects is beach tourism. Beach tourism objects are generally owned by the local Tourism Office, but in the South Malang Regency area, almost 90% of the beach tourism objects are managed by Perum Perhutani. The development of tourist objects continues to be carried out in order to increase the economic growth rate of Malang City, however there are differences in land ownership which makes the process of developing this beach tourism object a little more complicated. The theory used in this research is collaborative governance and development of tourist objects. This study uses a qualitative method with the type of approach used is a descriptive approach. The data collection method used is in the form of interviews, documentation, and literature studies on previous research.*

Keywords: *Tourism object development, Collaborative governance, Batu Bengkung Beach*

Abstrak. Tujuan penelitian ini guna menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata pantai batu bengkung Kabupaten Malang. Kabupaten Malang memiliki begitu banyak ragam potensi objek wisata, salah satu objek wisata unggulan ialah objek wisata pantai. Objek wisata pantai umumnya dimiliki oleh Dinas Pariwisata setempat akan tetapi pada wilayah Kabupaten Malang Selatan hampir 90% objek wisata pantainya dikelola oleh Perum Perhutani. Pengembangan objek wisata terus dilakukan guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang, akan tetapi terjadi adanya perbedaan kepemilikan lahan ini yang menjadikan proses pengembangan objek wisata pantai ini menjadi sedikit lebih rumit. Teori yang digunakan pada penelitian ini yakni *collaborative governance* dan pengembangan objek wisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah berupa wawancara, dokumentasi, dan studi literatur terhadap penelitian terdahulu.

Kata kunci : Pengembangan objek wisata, Collaborative governance, Pantai Batu Bengkung

LATAR BELAKANG

Indonesia secara geografis merupakan negara dengan sumber daya alam yang indah dan beragam. Selain itu, Indonesia sebagai Negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan didukung dengan sumber daya alam yang indah nan melimpah sehingga dapat dijadikan sebagai potensi objek kegiatan pariwisata. Dengan modal sumber daya alam inilah bisa dijadikan aspek utama dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata menurut Pendit (1994) adalah kegiatan orang-orang dalam jangka waktu pendek, ke tempat-tempat tujuan diluar tempat tinggalnya dan tempat bekerjanya, serta diluar kegiatan-kegiatan mereka dan selama di tempat tujuan mempunyai berbagai maksud termasuk kunjungan wisata.

Pariwisata adalah kegiatan yang sangat kompleks yang dapat dilihat sebagai sistem besar yang terdiri dari ekonomi, ekologi, politik, sosial dan budaya. Sebagai suatu sistem pariwisata, analisis berbagai aspek pariwisata tidak dapat dipisahkan dari subsistem lain seperti politik, ekonomi, dan budaya dalam hal saling ketergantungan dan saling keterikatan (Ismail et al., 2022) Sebagai sebuah Negara maritim, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Panjang garis pantai di Indonesia berkisar 81.290km (Nastiti & Umilia, 2013), begitu panjang garis pantai yang dimiliki Indonesia sehingga begitu banyak pula pantai-pantai indah yang dimiliki. Salah satu objek wisata yang banyak diminati oleh wisatawan & turis ialah objek wisata pantai atau biasa dikatakan sebagai objek wisata bahari dikarenakan Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki beragam pantai-pantai indah yang dapat dijadikan sebagai objek wisata.

Sebelum membahas lebih dalam kita perlu mengetahui definisi mengenai objek wisata bahari, (Junaid, 2018) mengemukakan definisi wisata bahari ialah *“those recreational activities that involve travel away from one’s place of residence and which have as their host or focus the marine environment (where the marine environment is defined as those waters which are saline and tide-affected)”* terjemahan “kegiatan rekreasi yang melibatkan perjalanan jauh dari tempat tinggal seseorang dan yang memiliki sebagai tuan rumah atau fokus lingkungan laut (di mana lingkungan laut didefinisikan sebagai perairan yang asin dan pasang surut)”.

Pengembangan objek wisata terus dilakukan oleh Pemerintah dikarenakan industri pariwisata di Indonesia turut berkontribusi secara aktif dalam keberlangsungan sektor ekonomi negara. Pengembangan objek wisata harus dikelola secara baik dan benar supaya dapat mencapai tujuan, adapun dijelaskan pada UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada BAB I Pasal 4 menjabarkan mengenai tujuan pariwisata salah satunya ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka dalam hal ini, apabila objek wisata dapat

dikembangkan secara baik dan benar maka hasil yang di dapat ialah meningkatnya sarana, prasarana, dan kualitasnya yang secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan kunjungan dari objek wisata tersebut, apabila objek wisata tersebut mengalami peningkatan jumlah pengunjung maka akan terciptanya pula sebuah peningkatan pendapatan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata tidak hanya peran pemerintah lah yang secara mandiri melaksanakannya, akan tetapi pihak-pihak lain seperti masyarakat dan pihak swasta juga bisa turut andil dalam proses pelaksanaannya.

Terdapat begitu objek wisata yang ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur salah satu yang paling terkenal ialah wisata bahari. Terdapat banyak pantai-pantai indah yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata, mulai dari pantai Balekambang, pantai Sendang Biru, pantai Ngliyep, Pantai Batu Bengkung, dsb. Begitu banyak pantai yang dimiliki Kabupaten Malang, akan tetapi perlu diketahui dari banyaknya pantai tersebut masih sedikit pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Malang sisanya banyak dikelola oleh Perum Perhutani dikarenakan letak pantai-pantai tersebut terletak pada kawasan hutan-hutan yang dilindungi. Menurut (Ramanda et al., 2020) pengelolaan destinasi wisata pantai terdiri dari Perhutani dan Dinas Pariwisata, Perum Perhutani mengelola hampir 90% destinasi wisata pantai dan sisanya baru dikelola oleh Dinas Pariwisata. Pantai Batu Bengkung salah satu pantai indah yang dikelola oleh Perum Perhutani. Pantai ini terletak di Desa Gajahrejo, Kec. Gedangan, Malang, Jawa Timur lebih tepatnya berada disebelah barat Pulau Sempu Malang.

Pengembangan objek wisata pantai Batu Bengkung terus dilakukan, akan tetapi karena dikelola oleh Perum Perhutani maka Dinas Pariwisata tidak bisa menjadi pemberi keputusan sepenuhnya, keputusan sepenuhnya berada di pihak Perum Perhutani. Dalam penelitian ini akan menjabarkan kolaborasi antara Perum Perhutani, Dinas Kepariwisata, serta Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Pantai Batu Bengkung.

KAJIAN TEORITIS

a. Pengembangan Objek Wisata

(Jayanti, 2019)memberikan definisi mengenai pengembangan objek wisata atau pariwisata ialah sebagai suatu rangkaian upaya dalam mewujudkan keserasian pemanfaatan berbagai sumber daya alam sebagai objek wisata dan mengintegrasikan berbagai bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung demi keberlangsungan pengembangan pariwisata. (Jayanti, 2019)menuturkan bahwa terdapat 3 faktor yang menjadi penentu keberhasilan suatu pengembangan objek wisata, yaitu : (1)

tersedianya objek wisata dan atraksi wisata sebagai bentuk daya tarik untuk mendatangkan wisatawan berkunjung pada objek wisata tersebut, misalnya keindahan alam, kebudayaan, tata cara kehidupan masyarakat, acara tradisional atau upacara keagamaan, (2) akses sarana dan prasarana yang memadai bagi wisatawan untuk berkunjung menikmati objek wisata tersebut, (3) tersedianya fasilitas penyediaan pelayanan kepada para wisatawan yang berkunjung pada objek wisata tersebut.

Penelitian (Jayanti, 2019) meneliti mengenai pengembangan objek wisata pantai Gandorah, PARIAMAN dengan didapati hasil penelitian yaitu: pengembangan yang dijalankan oleh pemerintah dapat dikatakan berjalan dengan baik dapat dibuktikan dengan adanya perencanaan pengembangan objek wisata bagi masa depan yang sudah dilakukan pada tingkat bawah yaitu pada desa.

Pada penelitian Yati (2019) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata dapat dilakukan dengan menggali potensi yang terdapat pada objek wisata tersebut. Setelah menggali potensi pada objek wisata, maka perlu diadakan sebuah promosi guna mengundang para wisatawan untuk berkunjung.

b. Collaborative Governance

Collaborative governance menurut Ansel dan Gash (2007:543) sebuah strategi baru dalam tata Kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul diforum yang sama untuk membuat sebuah konsesnsus bersama (Anggraeny, 2022). Terdapat 6 kriteria yang ditekankan oleh Ansell dan Gash (2007:544) dalam proses collaborative governance yakni: 1. Forum tersebut diinisiasi oleh institute public, 2. Partisipan dalam forum tersebut harus mencakup para aktor non-pemerintah, 3. Partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar berkonsultasi dengan pihak pemerintah, 4. Forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan rutin, 5. Kebijakan yang diambil harus berdasarkan consensus, 6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik.

Pada penelitian (Pramesti et al., 2022) mengenai collaborative governance dalam pengembangan potensi wisata didapati hasil. Bahwa collaborative governance sebuah kegiatan yang melibatkan beberapa pihak-pihak yang terkait. Dalam upaya pengembangan objek wisata dalam penelitian ini proses collaborative governance yang dilakukan ialah dimulai dari: (1) face to face (dialog tatap) muka dalam upaya mengembangkan potensi wisata yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak pengelola dengan mengadakan suatu pertemuan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam forum

musyawarah. (2) Trust building (membangun kepercayaan) yakni dilakukan dengan adanya sigap melakukan beberapa interaksi dengan pihak masyarakat agar simpati dan ingin membantu dalam pengembangan pariwisata. (3) Commitment to process yakni komitmen yang dilakukan dalam mengembangkan objek wisata dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. (4) Share understanding ialah berupa pemberian pemahaman mengenai keputusan yang dilakukan bersama.(Pramesti et al., 2022).

Pada penelitian Riski et al. (2022) pengembangan objek wisata dengan perspektif collaborative governance didapatkan hasil, bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan indeks pembangunan dengan cara menekankan pada komitmen. Karena factor komitmen merupakan factor yang paling penting dalam pengembangan objek wisata dengan menggunakan perspektif collaborative governance.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan ialah deskriptif. Sigiyo (2009:80) metode penelitian kualitatif diartikan sebagai metode penelitian ilmu social yang mengumpulkan serta menganalisis data berupa kata-kata dan perilaku manusia serta peneliti tidak menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dengan demikian tidak menganalisis dengan angka-angka. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif (Nana Syaodih, 2011:73) merujuk pada mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, bersifat ilmiah maupun rekayasa manusia yang memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Dengan lokus penelitian ini pada Pantai Batu Bengkung, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang Selatan. Adapun data primer dan sekunder yang didapat dengan berupa hasil wawancara para pekerja pantai serta pemerintah desa terkait, dokumentasi, dan studi literatur terhadap penelitian terdahulu. Adapun proses analisis data yang dilakukan meliputi identifikasi data, reduksi data, abstraksi data, interpretasi data, serta pemeriksaan abstraksi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Malang mengalami kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dimana pada 2022 ini laju pertumbuhan ekonominya mencapai 6,32% sedangkan pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonominya berada pada 4,21% dan pada 2020 laju pertumbuhan ekonominya berada pada -2,26% (bps malang:2023). Pertumbuhan laju ekonomi ini merupakan hasil dari sebuah kolaborasi untuk pemulihan dalam sektor ekonomi, adapun kolaborasi yang dilakukan ialah berupa pembangunan Malang Creative Center dengan

memberikan berbagai fasilitas berbagai macam program 17 subsektor ekonomi kreatif, penguatan peran UMKM, revitalisasi pasar rakyat, penciptaan ekosistem usaha yang menarik investasi, reformasi birokrasi yang semakin berdampak, serta pengembangan destinasi wisata tutur (Drs. H. Sutiaji/Wali Kota Malang:2023).

Pengembangan destinasi wisata menjadi salah satu faktor dari kenaikan laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang, seperti yang diketahui bahwa Kota Malang merupakan salah satu Kota di Jawa Timur yang memiliki beragam potensi objek wisata, mulai dari wisata alam, budaya, desa wisata, & bahari. Wisata bahari menjadi salah satu objek wisata yang paling terkenal di Malang, Made (2017) menuturkan bahwa ada banyak potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Malang dan yang paling diminati ialah wisata pantai atau wisata bahari, berdasarkan data yang ada diketahui bahwa terdapat sekitar 101 objek wisata pantai yang terdapat pada Kabupaten Malang. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dalam kepemilikan objek wisata pantai yang terdapat pada Kabupaten Malang ini terbagi menjadi 2 yakni: Perum Perhutani dan Dinas Pariwisata. Perbedaan kepemilikan ini menjadikan terdapatnya perbedaan dalam hal pengelolaan pengembangan objek wisata.

Pantai Batu Bengkung merupakan salah satu pantai yang dimiliki oleh Perum Perhutani Kabupaten Malang. Pantai ini baru dijadikan sebagai objek wisata dengan Perum Perhutani yang kemudian bermitra dengan sebuah kelompok masyarakat untuk mengelola pantai ini setiap harinya. LDMH Tani Maju merupakan sebuah kelompok masyarakat yang mengelola pantai Batu Bengkung yang bermitra dengan Perum Perhutani, ada beberapa pantai yang dikelola oleh kelompok masyarakat ini salah satunya Pantai Batu Bengkung ini.

Pantai ini terletak pada Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang Selatan. Malang selatan terkenal memiliki begitu banyak pantai yang berderet dari ujung ke ujung, dimana pantai-pantai tersebut menawarkan keindahan yang berbeda-beda. Misalnya pantai Batu Bengkung menawarkan keindahan berupa batu-batuan karang yang indah, ada sebuah batu karang yang secara alami berubah menjadi sebuah kolam unik yang menjadikan ciri khas dari pantai ini. Pantai ini merupakan salah satu dari sekian banyak pantai yang terdapat pada Jalur Lintang Selatan yang dijadikan sebagai objek wisata, bersaing dengan pantai-pantai indah lainnya menjadikan pantai ini harus melakukan sebuah pengembangan objek wisata guna menarik wisatawan untuk berkunjung disana. Dikarenakan pemilik dari pantai ini ialah Perum Perhutani bukan milik Dinas Pariwisata Pemkab Malang, maka sulit bagi Dinas Pariwisata untuk mengembangkan objek wisata ini maka yang bisa melakukan pengembangan objek wisata ini ialah Perum Perhutani.

1. Pengembangan Objek Wisata Pantai Batu Bengkung

Pengembangan wisata pariwisata menurut Swarbrooke (dalam kulonprogokab.go.id) merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan keberlangsungan pengembangan pariwisata. Rizky (2018:26) pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik wisatawan untuk mengunjunginya. Tujuan dari pengembangan objek wisata ialah untuk mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian dan kebudayaan, dan sumber daya alam lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkungan setempat. Dalam pengembangan objek wisata maka banyak pihak yang terlibat dalam prosesnya mulai dari pemerintah, swasta, serta masyarakat.

Pengembangan objek wisata biasanya dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan mengadakan event-event pada objek wisata tersebut, akan tetapi dalam kasus pantai Batu Bengkung pemilik pantai ini adalah Perum Perhutani maka Dinas Pariwisata tidak bisa leluasa untuk melakukan pengembangan harus terjalin komunikasi antara 2 pihak tersebut. Pihak Pemkab Malang membuat MoU dengan pihak Perhutani guna melakukan pengembangan ini, yang kemudian dari pihak Perhutani melakukan kesepakatan dengan kelompok masyarakat sekitar serta masyarakat sekitar guna membantu proses pengembangan objek wisata pantai Batu Bengkung ini. Adapun beberapa pengembangan yang dilakukan ialah membenahi akses infrastruktur menuju ke objek wisata, memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat sekitar objek wisata, mempekerjakan masyarakat sekitar objek wisata guna meningkatkan penghasilan masyarakat.

2. Collaborative Governance

Collaborative Governance dalam penyelenggaraan pengembangan objek wisata merupakan sebuah hal yang dibutuhkan guna mencapai kesepakatan bersama. (Mashudi & Fauziah, 2019) menuturkan bahwa *collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba, hal tersebut muncul karena disebabkan adanya inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk melakukan kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi publik. Adapun proses *collaborative governance* dalam mengembangkan objek wisata pantai Batu Bengkung, yaitu :

1. *Face to Face* : Dalam proses pengembangan objek wisata dibutuhkannya sebuah komunikasi oleh antar pihak, dalam hal ini Pemkab Malang, Perum Perhutani, serta LDMH Tani Maju (sebagai perwakilan masyarakat). Dalam hal ini Pemkab Malang berkomunikasi kepada Perum Perhutani untuk menawarkan kesepakatan mengenai pengembangan objek wisata, dikarenakan pantai ini terletak pada zona kepemilikan Perum Perhutani dan hasil yang didapati penulis ialah komunikasi antara Pemkab dan pihak Perhutani berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya pengembangan akses infrastruktur menuju objek wisata. Kemudian pihak Perhutani menjalin komunikasi kepada pihak LDMH Tani Maju yang berperan sebagai mitra dalam pengelolaan objek wisata pantai ini, dengan komunikasi yang dilakukan didapati hasil yakni sebuah perjanjian kerjasama yang setiap tahunnya akan diganti.
2. *Trust Building* : Setelah proses komunikasi tatap muka maka tahap selanjutnya dibutuhkan sebuah proses untuk membangun kepercayaan antar semua pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata ini. Perum Perhutani disini membangun kepercayaan kepada LDMH Tani Maju supaya membangun kerjasama dengan masyarakat sekitar dengan menyakinkan bahwa dengan adanya pengembangan objek wisata ini masyarakat akan mendapatkan sebuah lapangan pekerjaan yang dapat membantu menunjang kehidupannya.
3. *Commitment to process* : Komitmen antar pihak harus dilakukan dalam proses pengembangan ini. Komitmen dari pihak LDMH yang masih terus melakukan kerjasama dengan perum Perhutani dengan tiap tahunnya terus menyetujui perjanjian kerjasama tiap tahunnya.
4. *Share understanding* : Pemberian pemahaman atas keputusan dalam pengembangan objek wisata Pantai Batu Bengkung. Dilakukannya pertemuan oleh pihak LDMH Tani Maju setiap satu tahun sekali untuk memberikan pemahaman mengenai perjanjian kerjasama, akan tetapi apabila dalam keadaan terdesak makan akan diadakan pada saat itu juga, supaya tidak terjadi konflik akibat kesalahan pemahan dan kolaborasi yang terjalin terus terjaga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pengembangan objek wisata Pantai Batu Bengkung dilakukan *collaborative governance* dari pihak Pemkab Malang, Perum Perhutani, dan LDMH Tani Maju. Dimana Pemkab ingin mengembangkan potensi objek wisata pantai Batu Bengkung akan tetapi terhalang oleh kepemilikan lahan dimana pantai Batu Bengkung ini berada di zona kepemilikan Perum Perhutani, hal ini menjadikan Pemkab meluncurkan kerjasama pengembangan objek wisata. Tetapi pada pengembangannya pantai Batu Bengkung, Perum Perhutani lah yang menjadi pihak utama dalam memberikan keputusan. Adapun proses *collaborative governance* 1) *face to face* yakni berupa komunikasi antar pihak yang terlibat dalam proses pengembangan objek wisata, 2) *trust building* membangun kepercayaan kepada antar pihak yang ikut dalam proses pengembangan objek wisata, pada hal ini Perum Perhutani membangun kepercayaan kepada LDMH Tani Maju dengan menjadikannya mitra pengelola objek wisata pantai Batu Bengkung dan kemudian LDMH Tani Maju membangun kepercayaan pada masyarakat sekitar agar ikut tergabung dalam proses pengembangan objek wisata, 3) *commitment to process* yakin dan terus berkomitmen antar satu pihak dengan pihak lain agar kolaborasi yang dilaksanakan berjalan dengan baik, dengan hasil yang didapatkan ialah LDMH Tani Maju terus berkomitmen dengan Perum Perhutani dalam upaya pengembangan objek wisata, 4) *share understanding* memberikan pemahaman dengan mengadakan agenda rutin setiap tahunnya untuk memberikan pemahaman mengenai perjanjian kerjasama yang dilakukan tiap tahunnya, supaya kolaborasi yang dilakukan berjalan dengan lancar.

Adapun saran yang diberikan kepada pihak Perum Perhutani untuk lebih memberikan pendampingan lebih kepada LDMH Tani Maju dan masyarakat sekitar pantai dengan memberikan sosialisasi mengenai pemasaran objek wisata guna meningkatkan kreatifitas dalam meningkatkan jumlah wisatawan objek wisata yang akan berguna bagi kesejahteraan masyarakat sekitar serta Perum Perhutani sendiri.

DAFTAR REFRENSI

- Ismail, H., Wahyudi, E., & Puspaningtyas, A. (2022). *Perspektif Collaborative Governance Di Kabupaten Gresik Inclusive Development Of Delegan Beach Tourism In*. 13(1), 1–8.
- Jayanti, N. P. (2019). Pengembangan Objek Wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman. *Jurnal Pariwisata*, 6(2), 141–146. <https://doi.org/10.31311/Par.V6i2.5691>
- Junaid, I. (2018). *Pariwisata Bahari: Konsep Dan Studi Kasus*.
- Mashudi, & Fauziah, L. (2019). Formulasi Pengembangan Destinasi Pariwisata : Tinjauan Strategis Dalam Perspektif Collaborative Governance. *Conference On Public Administration And Society*, 01, 410–429.
- Nastiti, C. E. P., & Umilia, E. (2013). *Faktor Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Jember*. 2(2).
- Pramesti, D., Sulistio, E. B., & Atika, D. B. (2022). Model Pengembangan Potensi Pariwisata Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Di Taman Wisata Alam Wira Garden). *Jurnal Birokrasi, Kebijakan, Dan Pelayanan Publik*, 4(1), 115–124.
- Ramanda, P., Hakim, L., & Pangestuti, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Dan Daya Tarik Wisata Koridor Jalur Lintas Selatan Kabupaten Malang. *Profit*, 14(01), 22–31. <https://doi.org/10.21776/Ub.Profit.2020.014.01.3>